

ABSTRAK

Perkembangan permukiman terkait dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya permintaan lahan permukiman. Selama kurun waktu 5 tahun (2016 - 2020) terjadi peningkatan jumlah penduduk dan jumlah bangunan tempat tinggal. Namun, saat ini beberapa permukiman di Perkotaan Pemalang berada pada kawasan rawan bencana banjir. Tahun 2016 hingga tahun 2019 terjadi 44 kejadian banjir yang mengakibatkan penduduk mengalami kerugian secara material maupun non material. Selain itu, Kabupaten Pemalang juga merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah yang berfungsi sebagai daerah penyangga pangan. Lahan permukiman yang terus meningkat dan tidak terkendali dapat mengakibatkan perkembangan permukiman pada lahan-lahan yang tidak sesuai sehingga mengganggu fungsi lahan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan lahan permukiman berdasarkan kemampuan lahan pada kawasan rawan banjir di Perkotaan Pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan spasial. Teknik analisis pada penelitian ini memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG) meliputi analisis overlay dengan skoring dan pembobotan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan permukiman terjadi pada lokasi yang sudah sesuai dengan kemampuan lahannya. Namun, perkembangan permukiman ditemukan terjadi pada kawasan rawan banjir dengan potensi rawan banjir sedang seluas 5,36 Ha (2,47%) dan potensi rawan banjir tinggi seluas 211,32 Ha (97,53%). Berdasarkan arahan pola ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 hasil penelitian menunjukkan terdapat lokasi perkembangan permukiman yang sesuai dengan arahan pola ruang seluas 233,67 Ha di 27 kelurahan dan tidak sesuai seluas 10,01 Ha di 13 kelurahan. Perkembangan permukiman Kawasan Perkotaan Pemalang dilihat dari aspek fisiknya menunjukkan perkembangan terjadi pada lahan yang sesuai. Namun, Pemerintah perlu melakukan pembatasan perijinan pembangunan pada beberapa kelurahan seperti Kelurahan Mulyoharjo dan Kelurahan Banjardawa untuk menghindari terjadi kepadatan permukiman. Selain itu, Pemerintah perlu meninjau kembali arahan pola ruang Kabupaten Pemalang karena belum mengakomodasi dinamika perkembangan yang terjadi.

Kata Kunci : *Kawasan Perkotaan Pemalang, Rawan Banjir, Perkembangan Permukiman, Kemampuan Lahan*